



KR-Antara/Hendra Nurdiansyah

PERAGAAN BUSANA BATIK: Sejumlah model memperagakan busana kreasi kain batik di Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (2/10/2024). TWC Prambanan menggelar peragaan busana dengan latar belakang candi tersebut karya tujuh perancang busana dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional.

Golkar

dalam Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu di hari.

Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya itu terpilih sah setelah meraih 95 suara, mengungguli mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni La Nyalla Mattalitti yang mendapatkan dukungan 56 suara. "Sultan Najamudin ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPD RI terpilih," kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Pemungutan suara diikuti 151 Anggota DPD RI yang hadir berdasarkan kartu peserta pemungutan suara. Namun, berdasarkan penghitungan, hanya 150 suara

yang ada dalam kotak suara yang telah tercablos. Walaupun demikian, peserta sidang pemilihan itu meminta agar pimpinan sidang langsung melanjutkan penghitungan suara. Penghitungan surat suara pun dibacakan Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI itu menggunakan sistem paket berdasarkan Tata Tertib DPD RI. Adapun Sultan terpilih dengan paket pimpinan bersama tiga Wakil Ketua DPD RI yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung.

Sedangkan paket pimpinan yang tidak terpilih yakni La Nyalla Mattalitti sebagai calon Ketua DPD RI serta tiga calon Wakil

Ketua DPD RI yakni Nono Sampono, Elviana dan Andi Muh Ihsan.

Sultan Najamudin akan mengemban tugas sebagai pimpinan senator. Dalam penyampaian visi dan misinya, mengatakan akan membawa kebaruan dan inklusivitas dalam lembaga DPD RI untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

Adapun jalannya awal-awal persidangan itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir. Bahkan Sidang Paripurna itu pun sempat diskors oleh Ketua Sementara DPD RI Ismeth Abdullah karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan. (Ant/Obi)-d

Sambungan hal 1

Dewas

Iwan mengatakan, tindakan yang dilakukan Alexander Marwata itu telah melanggar ketentuan pasal 36 jo pasal 65 UU KPK. Pasal tersebut menyatakan, selaku Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ditangani KPK dengan alasan apapun. Selain itu, menurut Iwan, tindakan yang dilakukan oleh Alexander Marwata juga telah melanggar Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) KPK RI No. 3 Tahun 2021 pasal (4) ayat (2) huruf (a), yaitu melakukan hubungan langsung de-

ngan pihak yang berperkaranya merupakan pelanggaran berat.

"Mendesak kepada Dewas KPK agar mengusut tuntas pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Alexander Marwata. Hal itu perlu dilakukan guna menjaga maruah KPK dari oknum pimpinan KPK yang tidak berintegritas," tandas Iwan.

Sementara itu, Polda Metro Jaya berjanji akan terus memperbaiki (update) perkembangan pemanggilan Alexander Marwata terkait kasus pertemuan dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. "Terkait rencana pemanggilan AM, nanti kita akan update kapan waktunya saudara AM

yang akan diundang untuk klarifikasi dan dimintai keterangan oleh tim penyelidik dalam penanganan perkara aquo," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (2/10).

Ade Safri menjelaskan Kepolisian belum bisa memastikan kapan Alexander Marwata bakal dipanggil karena masih meminta klarifikasi terhadap saksi-saksi.

"Saat ini tim penyelidik masih akan meminta klarifikasi terhadap para saksi lainnya, sebelum nanti saudara AM diundang klarifikasi oleh Tim Penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," ucapnya. (Ant/Has)-f

Sambungan hal 1

Kabinet

Mengapa Prabowo menganggapnya perlu, karena Prabowo bukanlah Jokowi, walaupun semua orang tahu bahwa Jokowi berperan penting atas terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Setiap pemimpin baru perlu menunjukkan ke-khasan dalam kepemimpinannya. Kabinet Jokowi yang sangat dikenal sebagai kabinet koalisi para partai pendukungnya, bahkan termasuk partai rivalnya, sedapat mungkin harus diubah warna kinerjanya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Prabowo merealisasikan kabinet zaken itu?

Tanpa bermaksud memprediksi susunan kabinet Prabowo mendatang, marilah memanfaatkan pertanyaan di atas untuk membangun kemungkinan realisasi gagasan kabinet zaken tersebut secara teoritik. Pertama, membayangkan kemungkinan bentuk kabinet zaken itu secara 100% murni teknokrasi atau meritokrasi. Rasanya sulit untuk mengubah ipesonai kabinet parpol secara telak menjadi kabinet zaken yang murni berisi teknokrat tanpa pertimbangan afiliasi partai. Pesona koalisi Kim-Plus dalam pilkada Jakarta saat ini mengindikasikan kebenaran

dugaan di atas.

Rasanya mustahil menyusun kabinet dengan sama sekali melupakan dukungan parpol. Jika dugaan ini mengandung kebenaran, yang paling mungkin terjadi adalah kabinet zaken transisional, atau kabinet gado-gado, kabinet gabungan antara yang zaken dan yang parpol.

Kedua, jika terjadi kabinet gado-gado, perlu dicermati berapa persen muatan zaken-nya. Kalau ternyata masih lebih banyak unsur parpolnya, boleh jadi yang zaken justru akan menjadi bulan-bulanan jika terjadi perbedaan isu politik di masyarakat, karena teknokrat yang betul-betul imparial tidak mudah memungkannya.

Ketiga, selain masalah persentase komposisi zaken vs parpol, perlu juga dicermati posisi para menteri zaken itu dipasangi di kementerian mana? Apakah di kementerian strategis seperti Menko, Keuangan, Dalam Negeri, Pertahanan, ESDM atau Luar Negeri, atau sekadar kementerian seadanya saja. Walaupun jumlah menteri zakennya sedikit, kalau posisinya di kementerian strategis boleh jadi mereka akan mengendalikan alur kebijakan seluruh kabinet. Sebaliknya,

walaupun menteri zaken jumlahnya lebih banyak daripada yang parpol tetapi di posisi kementerian ecek-ecek sangat boleh jadi hanya akan jadi hiasan belaka.

Sebaliknya, di sisi lain orang bertanya, apakah kabinet berbasis parpol itu buruk? Kalau dilihat bahwa soal menyusun kabinet adalah persoalan politis dan teknis, maka sisi politik itu sama pentingnya dengan yang teknis. Bayangkan jika kabinet zaken adalah teknokrasi yang 100% imparial pada aspirasi politik, di samping mustahil juga perlu ditanyakan manfaatnya kepada negara dan bangsa.

Yang perlu dicatat kemudian adalah bahwa kabinet parpol itu bukan berarti para menteri adalah anti-teknokrasi semua. Banyak para aktivis parpol yang keahliannya dapat diandalkan dalam profesionalitas kementerian. Persoalannya adalah, apakah para menteri itu, baik yang zaken maupun parpol, sepenuhnya menyadari bahwa yang mereka kerjakan adalah demi bangsa dan negara dengan berbagai sudut pandang penilaiannya? Insya Allah bisa! (Penulis, Guru Besar Emeritus Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)-d

Sambungan hal 1

MENTERI PAN-RB:

Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Pemerintah Baru

JAKARTA (KR) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu keputusan dari Pemerintah yang baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

la mengatakan, berdasarkan arahan yang baru disebut bahwa Pemerintah masih harus menuntaskan ekosistem IKN yang ada di Kalimantan Timur.

"Saat ini sebenarnya sudah ada 500 unit apartemen yang siap huni, tetapi kondisi infrastruktur jalan masih berdebu, begitu juga sistem digital yang masih perlu dituntaskan," kata Azwar Anas di Jakarta, Rabu (2/10).

la mengungkapkan, Kementerian PAN-RB telah menyiapkan rencana atau plan A, B, dan C, tetapi itu semua masih akan menunggu arahan dari presiden yang baru nanti.

terkait kapan waktunya, Azwar menegaskan, semuanya tergantung pemerintahan berikutnya.

Sebab, saat ini semuanya masih dalam proses transisi dari pemerintahan di bawah Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Ya kalau waktu tentu itu keputusan ada pada pemerintahan yang baru untuk memutuskan, tetapi yang pasti kami sudah mempersiapkan sejumlah skenarionya," ujar Bupati Banyuwangi Periode 2016-2021 itu.

Sementara itu, salah satu langkah pemindahan ASN di IKN, direncanakan terdiri atas ASN Kementerian/Lembaga, termasuk CPNS khusus IKN tahun 2024, termasuk kuota khusus putra/putri terbaik di Provinsi Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN Pemrov Kaltim tersebut.

Namun, fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini pada masa jangka pendek (short term). Jangka pendek itu adalah fase pertama, yang berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital. (Ant/San)-f

Sembari itu, persiapan terus dimatangkan serta fasilitas perkantoran dan lain-lain, yang sekarang menurutnya progressnya menggembirakan. Namun

Pemda

"Ketika bicara SAKIP ke Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) itu soal kolaborasi. Harapan besar kami lebih ditekankan dan difokuskan pada perencanaan. Walaupun secara program sudah cukup banyak yang menyentuh ke program penanganan kemiskinan. Tapi kita tetap perlu memiliki alternatif berkaitan dengan pengukuran kemiskinan itu sendiri," paparnya.

Sebelumnya Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, nilai SAKIP sebagai bagian dari arahan Presiden yang menekankan perencanaan dan penggunaan anggaran untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas penting, tapi lebih penting penggunaan anggaran mendapatkan im-

pact yang paling besar bagi kesejahteraan masyarakat. Ada empat indikator utama penilaian SAKIP yang semuanya merujuk pada kesejahteraan masyarakat, yaitu IPM, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hasil evaluasi SAKIP menjadi alat ukur yang terbaik terhadap kinerja Pemerintah Daerah selama ini.

"Capaian SAKIP dalam sepuluh tahun terakhir, tahun 2014 sampai 2023, menunjukkan tren positif. Pergerakan positif ini terlihat dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Selain Pemda DIY, Pemkab Banyuwangi dan Pemkot Surabaya juga meraih predikat AA Tahun 2024," paparnya. (Ira/Ria)-d

Warga

Bahkan, dari penjelasan perwakilan warga, upaya penolakan pembangunan tempat hiburan malam ini telah dilakukan melalui petisi yang ditandatangani 1.211 warga.

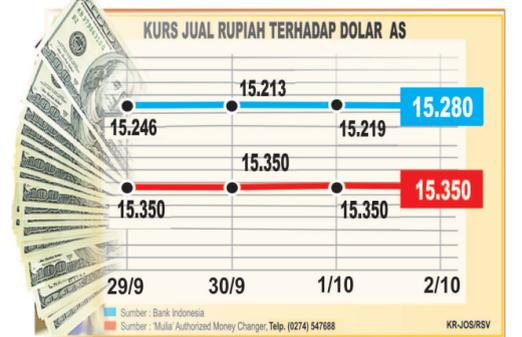
Menyikapi penolakan warga tersebut, Pjs Bupati Kusno Wibowo menegaskan, informasi yang dihimpun sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Sleman, pembangunan tempat hiburan malam di wilayah Dusun Kronggahan I belum mengantongi izin.

"Selain pembangunan yang tidak memiliki izin, pengurusan Tanah Kas Desa (TKD) tempat dimana pembangunan dilakukan belum berizin," tandasnya yang disambut riuh sejumlah perwakilan warga.

Sementara Lurah Trihanggo Fajar Junior yang dihadirkan dalam pertemuan dengan warga Kronggahan menyatakan akan memberhentikan seluruh proses izin dan pembangunan tempat hi-

buran malam Liquid. Usai melakukan pertemuan dengan perwakilan warga Kronggahan, Pjs Bupati Kusno Wibowo bersama Kepala Biro Tapem Setda DIY KPH Yudhonegoro menemui seluruh warga yang melaku-

kukan aksi damai di Pendapa Parasamya. Kepada warga disampaikan hasil pertemuan antara perwakilan warga Kronggahan dengan Lurah Trihanggo yang difasilitasi Pemkab Sleman. (Has)-f



Prakiraan Cuaca					3 Oktober 2024	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	22-30	65-95

Pentingnya Angkatan Siber di Era Digital

Krisnawati
Dosen Prodi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Amikom Yogyakarta

memperluas jangkauan penyebaran ideologi, baik yang positif maupun negatif. Dalam bidang politik, era digital mendorong transparansi dalam pemerintahan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital. Dalam bidang ekonomi era digital telah menciptakan ekonomi berbasis teknologi di mana bisnis e-commerce, fintech, dan startup teknologi berkembang pesat. Banyak pekerjaan tradisional digantikan oleh teknologi/otomatisasi dan kecerdasan buatan. Selain itu pekerjaan baru muncul di sektor teknologi informasi, analisis data, pengembangan perangkat lunak, dan cybersecurity. Dalam bidang sosial, media sosial dan aplikasi digital telah mengubah cara orang berinteraksi. Di bidang kehidupan masyarakat. Modus kejahatan di era digital tidak lagi hanya terbatas pada tindakan kriminal konvensional, tetapi telah berkembang dengan memanfaatkan internet, perangkat digital, dan platform daring. Beberapa diantaranya adalah phishing, ransomware, skimming, berita hoax, penipuan online, pencurian data online dan semua modus kejahatan lainnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Kejahatan ini bisa terjadi pada orang per orang, organisasi maupun suatu negara. Sampai hari ini sangat mudah ditemui berita dan informasi tentang kejahatan yang memanfaatkan teknologi. Bahkan belakangan ini pencurian data semakin marak terjadi, tidak hanya di Indonesia namun juga di negara lain. Bocornya data facebook, twitter, data pemilih di Amerika Serikat juga pernah mewarnai pemberitaan kejahatan di era digital. Di Indonesia sendiri kasus kebocoran data juga semakin sering terjadi. Mulai dari data Bank Indonesia, data pasien rumah sakit, data pelanggan PLN, data SIMCard bahkan beberapa bulan belakangan ini kebocoran data juga menimpa. Pusat Data Nasional (PDN).

Dengan semakin masifnya kegiatan di dunia digital mengakibatkan pertahanan siber menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Personil angkatan siber yang mumpuni diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap infrastruktur digital. Semua infrastruktur nasional sudah memanfaatkan teknologi digital. Jika terjadi serangan siber pada infrastruktur tersebut dapat dipastikan stabilitas negara akan terganggu. Angkatan siber tidak hanya bekerja secara preventif namun juga bekerja secara kuratif, dengan memperikan respon yang cepat untuk memulihkan kondisi ketika terjadi kejahatan siber. Beberapa negara yang sudah membangun angkatan siber di antaranya adalah Amerika Serikat, Tiongkok (Cina), Rusia Perancis, Jerman, Inggris, Korea Selatan, India dan Iran. Jumlah pengguna internet di dunia pada awal tahun 2024 telah mencapai 5,35 miliar orang, 66,2% dari 8,08 miliar penduduk dunia. Sedangkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa

dari total populasi 278.696.200 jiwa (data tahun 2023). Saat ini Kepolisian Republik Indonesia telah memiliki Unit Patroli Siber. Dikutip dari patrolisiber.id, Unit Patroli Siber merupakan tim dari Kepolisian RI yang bertugas memelihara keamanan warganet di ruang siber. Unit ini melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan segala bentuk kejahatan siber. Selain itu juga berperan langsung dalam memberikan edukasi masyarakat terkait implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), agar warganet tidak menjadi korban apalagi terjerumus menjadi pelaku kejahatan siber.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park